

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- A Graner, Bryan, *Black's Law Dictionary 8th Edition*, (St. Paul West Thomson : 2004)
- Anwar, H.A.K, Moch., *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981).
- Anwar, H.A.K, Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II*, (Bandung: Alumni, 1981).
- Arief Gosita dan Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hkum Acara Pidana*, (Bandung : Binacipta, 2006)
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2000)
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2002).
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2002).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional edisi ketiga (Jakarta: 2002)
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologis dalam Konteks KUHAP*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987)
- Et, Sahetapy, *Viktimolog Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Pusaka Sinar Harapan, 1987)
- Gosita, Arief, *Masalah Korban dan Kejahatan*, (Jakarta : CV. Akademika Persindo, 1983)
- Gosita, Arief, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, (Jakarta : Ind-Hill-Co, 1987)
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994).
- Joachim Friedrich, Carl, *Filsafat Etika, Perspektif Historis*, (Bandung : Nuansa dan Busamedis, 2004)
- Kusumohamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, (Jakarta : Grasindo. 2000).

- Lamintang, P.A.F, Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia, Cetakan Ketiga, (Bandung : Citra Aditya Bhakti , 1997).
- Lamintang, PAF, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Surabaya : Citra Aditya, 1997).
- Mahmud, Marzuki Peter, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2011).
- Mahmud Subhi, Ahmad, Filsafat Etika, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001)
- Manan, Bagir, et al., Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Bandung : Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2001).
- Mertokusumo, Soedikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta : Liberty, 1991)
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Bina Aksara, 1984).
- Muladi, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta : Habibie Center, 2002)
- Muladi, Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : PT Alumni, 1998).
- Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991).
- Prakoso, Djoko, dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP, (Jakarta : Bina Aksara, 1987).
- Prodjodikoro ,Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung : Eresco, 1981).
- Rahardjo, Satjipto, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996)
- S Praja, Juhaya, Filsafat Hukum Islam, (Bandung : Pusat Penerbitn Universitas LPPM UNISBA, 1995)
- Sianturi, SR, Azas-Azas Hukum Pidana dan Penerapannya, (Jakarta : Storia Grafika, 2002).
- Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Bandung : PT. Refika Adiatama, 2007)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).

Soekanto, Soerjono, dan Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaidah Hukum, (Bandung : Penerbit Alumni, 1982).

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004). Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010). Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994).

Soemitro, Ronny Hanitijo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

Soesilo, R, Pelajaran Lengkap Hukum Pidana, (Bogor : Pelitea, 1989).

Sudarto, Hukum Pidana 1, (Semarang : Yayasan Sudarto, 2009).

Susanto, IS, Kriminologi, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995)

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika 2002)

Yulia, Rena, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan , Cetakan. 2 (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010)

B. Jurnal Ilmiah :

Andika, Auliah, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Pencucian Uang, Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 2010).

Budiningsih, Widyawati, dan Jefri Hardi, Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan, Jurnal Hukum, Volume XIX, No. 19, (Oktober 2010).

Djanggih, Hardianto, Konsep Keadilan Dalam Perlindungan Saksi dan Korban, Tesis Fakultas Hukum Universitas Tonpotika Lawuk Banggai, (April 2018).

Dwisvimiari, Igne, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Volume 11 No. 3, (2011).

- Firmansyah, Hery, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum olume 23 No. 2, (Juni 2011).
- G. Widiartama, Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana, Jurnal *Justitiaet Pax* Universitas Atma Jaya, Volume 33 No. 1, (2017).
- Hendriana, Rani, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme : Antara Desiderata dan Realita, Jurnal Kosmik Hukum, Volume 16 No. 1, (Januari 2016).
- Iriyanto, Echwan, Pemberian Kompensasi dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga, (Surabaya : 2005).
- Kusumah, Mulyana W, Terorisme Dalam Perspektif Politik dan Hukum, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP Universitas Indonesia Volume 2 No. 3, (2002).
- Mareta, Josefhin, Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban, jurnal IJKH, Volume 10 No. 1, (Maret 2016).
- Maryanto, Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Ihsan Sultan Agung Semarang, Volume 13 No. 1, (2003).
- Nugroho, Sigit Sapto, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*), Jurnal Sosial Volume 15 No. 1 (Maret 2014).
- Purwanto, Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Panca Bhakti Pontianak, (2013).
- Purowleksono, Didik Endro, Tindak Pidana Di Bidang Merek dan Jenis Sanksinya, Jurnal Yuridika, Volume 20, (2005).
- Putri, Aprilia Dwinanda, Adopsi Unsur-Unsur *International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombing* Ke Dalam Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Terorisme (Studi Terhadap Keterlibatan Jurnalis Imam Firdaus Sebagai Individu Dalam Kasus Bom Serpong), Jurnal *Diponegoro Law Riview*, Volume 1 No. 4, (2012)

Ransun, Alvianto RV, Mekanisme pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana, Jurnal *Lex Crimen*, Volume 1, (Januari – Maret 2012)

Sandra Devi, AA Ayu Winda, Pengaturan Mekanisme Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Terorisme, Jurnal Hukum Universitas Udayana, (2014)

Sri Hartini, Tedi Sudrajat, dan Rahardi Wasi Bintoro, Model Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Banyumas, Jurnal *Dinamika Hukum*, Volume 12 No. 3, (September 2012)

Yusuf, Raihan, Analisis Viktimologi Kritis Terhadap Pemberian Kompensasi dan Restitusi Korban Terorisme di Indonesia, Tesis pada Universitas Indonesia, (2018)

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi
Manusia

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme Menjadi Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*

Undang – Undnag Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang – Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Resttusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembaharuan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Dan Pelaksanaan Kompensasi

Nota Kesepakatan Pedoman Kerja antara Kejaksaan Agung dan Lembaga Perindungan Saksi dan Korban Nomor NK-005/1.D1V4.2/04/2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power

Victims Of Crime Assistance Act 2009, Victoria

Victims Of Crime Assistance Tribunal, Victoria

D. Wawancara :

Syahrial M. Wiryawan, Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK, (Jakarta, 15 Januari 2019).

Firdi, Kepala Sub Bagian Kompensasi dan Restitusi Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK, (Jakarta, 15 Januari 2019).

Anggara, Direktur Eksekutif *Institution Of Criminal Justice Reform*, (Jakarta, 15 Januari 2019)

4 (Empat) Korban Serangan Terorisme Gereja Surabaya, (Surabaya, 13 Februari 2019)

E. Internet :

Bahasa Kita. “Depdiknas Terbitkan Peta Bahasa”. Diakses pada tanggal 16 Maret 2018. <https://www.bahasakita.com/depdiknas-terbitkan-peta-bahasa>

CNN. “UU Terorisme Bri Kompensasi Korban hingga Peristiwa Bom Bali”. Diakses pada tanggal 3 Januari 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180525165007-32-301344/uu-terorisme-beri-kompensasi-korban-hingga-peristiwa-bom-bali>

Dewan Perwakilan Rakyat. “Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI Dengan Badan Narkotika Nasional, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Sidang 2015-2016”. Diakses Pada tanggal 20 Desember 2018. http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3_laporan_RDP_dengan_Ko_mnas_HAM_.pdf

Dewan Riset Nasional. “Terorisme dan Penyebabnya di Indonesia”. Diakses pada tanggal 4 Desember 2018. <https://www.drn.go.id/index.php/kategori-artikel/45-artikel-drn?start=10>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. “Laporan Tahunan 2016”. Diakses pada tanggal 20 Desember 2018. <https://lpsk.go.id/>

- Media Neliti. “Pemberian Ganti Rugi oleh Pelaku kepada Korban Kejahatan Harta Benda menurut KUHP”. Diakses pada tanggal 28 November 2018.
<https://media.neliti.com/media/publications/109677-ID-pemberian-ganti-rugi-oleh-pelaku-kepada.pdf>
- Sindo News. “Keadilan Substantif – Jalan Pemikiran Prof Mahfud MD”.
Diakses pada tanggal 30 November 2018.
<https://profmahfud.wordpress.com/tag/keadilan-substantif/>
- Tribun News. “Hak Kompensasi Korban Terorisme Makin Diakui”. Diakses pada tanggal 30 November 2018.
<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/07/hak-kompensasi-korban-terorisme-makin-diakui>
- Tribun News. “LPSK beri Kompensasi Rp. 1,6 M bagi Korban Terorisme Kampung Melayu, Thamrin dan Mapolda SUMUT”. Diakses pada tanggal 20 Desember 2018.
<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/06/lpsk-beri-kompensasi-rp16-miliar-kepada-korban-terorisme-thamrin-kampung-melayu-dan-mapolda-sumut>
- Wikipedia. “Terorisme di Indonesia”. Diakses pada tanggal 18 November 2018. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Terorisme-di-Indonesia>
- Wikipedia. “Suku bangsa di Indonesia”. Diakses pada tanggal 16 Maret 2018. https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia